

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN**

Jl. Pahlawan No. 28A Telp. (0343) 424919

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

LKjIP adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan selama tahun anggaran 2022. Kemudian, laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pasuruan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan untuk mendukung Pemerintah Kota Pasuruan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Government*) di Kota Pasuruan.

Kami menyadari bahwa LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Pasuruan, 30 Januari 2023

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN**



Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 198602 1 041

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan dalam pembangunan ekonomi Kota Pasuruan adalah meningkatkan kontribusi PDRB Sektor Unggulan yang terdiri dari kontribusi PDRB kategori perindustrian dan kategori perdagangan. Dua kategori tersebut merupakan kategori yang mendominasi pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan. Pada tahun 2022, kedua kategori tersebut berkontribusi sebesar 49,63%. Artinya bahwa kategori perindustrian dan perdagangan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian di Kota Pasuruan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai instansi yang bertugas untuk membina dan mengembangkan sector perindustrian dan perdagangan di Kota Pasuruan, telah mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diemban dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah untuk memajukan ekonomi Kota Pasuruan. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 melalui 2 (dua) sasaran strategis dengan capaian masing-masing indikator sebesar 94% dan 416,6% dengan kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan telah memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa indikator kinerja program/kegiatan yang belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun hambatan yang dihadapi antara lain: ketidakstabilan harga bahan baku, keterbatasan jaringan pemasaran, kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang digital marketing, kurangnya pemahaman IKM terhadap legalitas usaha/sertifikasi produk, dan banyaknya pelaku IKM yang kurang kooperatif dalam menyampaikan omsetnya. Sehingga, upaya yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan kedepannya yakni melakukan pemantauan/monitoring harga bahan baku, membantu memasarkan produk IKM, baik melalui kegiatan pameran-pameran maupun membina/mendorong IKM untuk memanfaatkan digital marketplace yang telah tersedia, menyelenggarakan fasilitasi untuk legalitas dan sertifikasi produk IKM, dan melakukan sosialisasi serta evaluasi kepada pelaku IKM untuk memberikan informasi omset atau data yang diperlukan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	7
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis.....	8
1.4 Dasar Hukum.....	10
1.5 Sistematika Laporan Kinerja.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022.....	16
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 Capaian Kinerja.....	23
3.1.1 Skala Capaian Kinerja.....	23
3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	23
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	24
3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Akhir Target Jangka Menengah.....	25
3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.....	26
3.1.6 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis.....	27
3.1.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
3.1.8 Analisis Keberhasilan	32
3.2 Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	13
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan	16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022.....	17
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022	17
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022.	20
Tabel 2.7	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022	20
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja.....	23
Tabel 3.2	Capaian IKU Perangkat Daerah	24
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja.....	24
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	25
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi	26
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Sasaran Pertama.....	27
Tabel 3.7	Total Nilai Produksi Sektor Unggulan Tahun 2021 dan 2022	27
Tabel 3.8	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Sasaran Pertama	28
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Sasaran Kedua.....	29
Tabel 3.10	Total Nilai Omset Produk Unggulan Tahun 2021 dan 2022.....	29
Tabel 3.11	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Sasaran Kedua	29
Tabel 3.12	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	31
Tabel 3.13	Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	32
Tabel 3.14	Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Orientasi pada input, terutama anggaran seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian anggaran tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result-oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini diwujudkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

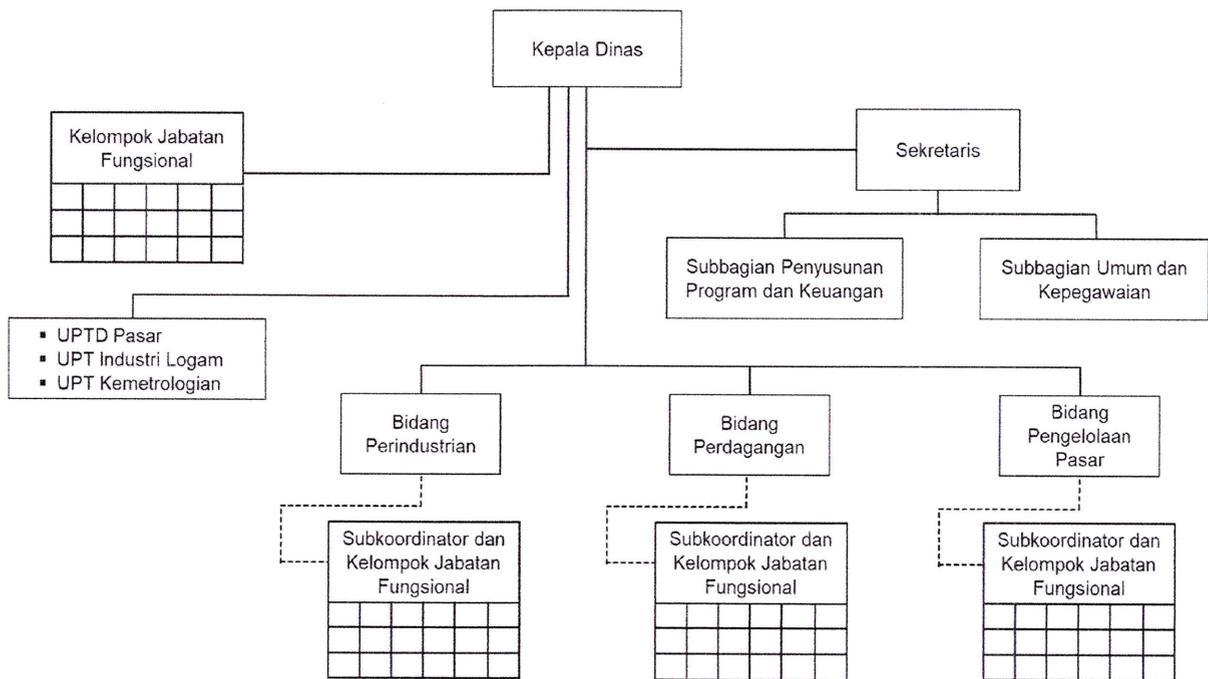
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Penyusunan LKJIP tahun 2022 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

LKJIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perindustrian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan (berdasarkan Peraturan Walikota No.3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah)

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar;
- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- g. Pembinaan terhadap UPT.

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Isu strategis pada hakikatnya merupakan masalah yang harus diprioritaskan untuk ditangani oleh pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan urgensi, relevansi penanganan, kedudukan dan kemampuan daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program-program pembangunan. Dari analisis lingkungan internal maupun eksternal dapat dirumuskan isu strategis yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan lima tahun dalam kaitannya dengan fokus misi dan agenda, antara lain:

1. Penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB
2. Harga bahan pokok yang fluktuatif
3. Lemahnya sarana prasarana perdagangan

Permasalahan Utama pada Bidang Perindustrian dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan meliputi :

1. Kurangnya sarana prasarana untuk kebutuhan industri logam, seperti mesin dan sarana promosi produk logam;
2. Ketersediaan tenaga terampil yang masih kurang untuk industri kecil menengah (IKM) komoditi kerajinan (regenerasi yang minim);
3. Keterbatasan anggaran/biaya untuk kepengurusan legalitas bahan baku kayu bagi IKM mebel berupa pelayanan dan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK);
4. Pengembangan usaha yang terkendala modal bagi IKM makanan dan minuman; dan
5. Industri kreatif yang terkendala pengembangan produk berupa media promosi yang masih kurang.

Untuk permasalahan utama pada Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan meliputi:

1. Adanya masa transisi dari pandemi menuju endemi yang menyebabkan pelaku usaha berusaha untuk meningkatkan penjualannya;
2. Kurangnya pengusaha yang memahami regulasi tentang cara ekspor yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaku usaha dan perkembangan perusahaan dalam mempromosikan produk ekspor;
3. Belum maksimalnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan system kemitraan, sehingga diperlukan terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatkan teknologi informatika;
4. Pengembangan/Revitalisasi kawasan perdagangan dan jasa (pengembangan pasar);
5. Belum adanya regulasi tentang perusahaan berkategori ekspor-import untuk melaporkan datanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
6. Masih banyaknya pengusaha UKM yang belum memanfaatkan potensi pemasaran antar daerah/antar pulau melalui fasilitas pasar lelang komoditi, hal ini sangat berpengaruh pada sistem promosi dan distribusi lokal Kota Pasuruan;
7. Kurang adanya kesadaran dari para pedagang pasar atau diluar lingkungan pasar terhadap peneraan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan perlengkapannya, sehingga untuk menciptakan pasar tertib ukur masih jauh dari harapan dan banyak konsumen yang dirugikan; dan
8. Kurangnya keinginan untuk memanfaatkan fasilitas pendaftaran online pelayanan tera-tera ulang oleh pemilik alat-alat UTTP terutama di tingkat perusahaan.

Sedangkan permasalahan utama pada Bidang Pengelolaan Pasar dan Penataan Pedagang Kaki lima meliputi:

1. Data PKL di Kota Pasuruan sudah lama sehingga perlu adanya pendataan ulang terhadap PKL;
2. Peraturan yang mengatur tentang Penataan PKL sudah terlalu lama sehingga perlu dikaji ulang;

3. Masih banyak PKL yang melanggar lokus (lokasi khusus) yang sudah ditetapkan di Perwali sehingga perlu adanya Pembinaan/Sosialisasi berkelanjutan terhadap para PKL tentang Regulasi/Peraturan yang berkaitan dengan PKL;
4. Masih banyak sarana prasarana pasar yang kurang layak sehingga perlu adanya pemeliharaan/pembaruan terhadap sarana prasarana yang ada di Pasar Rakyat;
5. Penataan pasar rakyat yang kurang bagus dan tidak nyaman bagi konsumen sehingga perlu adanya rehabilitasi/revitalisasi baik fisik maupun non fisik pasar; dan
6. Banyak bedak/kios di pasar yang tidak digunakan oleh pemilik hak pakai, terutama pada bedak/kios yang berada di lantai dua pasar.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, Penjelasan Umum Organisasi, Permasalahan dan Isu Strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dasar Hukum dan sistematika penyajian.
- BAB II : Perencanaan Kinerja
Memuat Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kinerja Tahun n (Sumber: Renja) dan Perjanjian Kinerja Tahun dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja
Berisi penjelasan singkat tentang Capaian Kinerja Organisasi beserta Analisisnya (disusun Tabel sebagai media pendukung yang memudahkan Pemahaman), juga Uraian Realisasi Anggaran.
- BAB IV : Penutup
Berisi kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- LAMPIRAN : Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

A. Visi

" Pasuruan Kota Madinah " **Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya**

- a. Maju Ekonominya :
 - Pembukaan Lapangan Pekerjaan
 - Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif
 - Pengembangan Wisata Terintegrasi (Religi, Heritage, Edukasi, dan Kampung Tematik)
 - Bantuan Modal Usaha untuk Perempuan Kepala Keluarga
 - Revitalisasi BUMD dalam Penguatan Pendapatan Daerah.
- b. Indah Kotanya
 - Infrastruktur dan lingkungan hidup yang ramah dan nyaman
- c. Harmonis Warganya
 - Pendidikan Gratis Berkualitas
 - Kesehatan Gratis, Standarisasi Faskes, dan Percepatan Penanganan Covid 19
 - Digitalisasi Layanan dan Pemerintahan yang Melayani
 - Kemudahan Layanan 1 Pintu Sehari Mesti Jadi

B. Misi

- Misi 1. Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan.
- Misi 2. Membangun Kota Yang Indah dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan.
- Misi 3. Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multi Kultural Yang Harmonis dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.
- Misi 4. Transformasi Layanan Publik Yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi Yang Adaptif.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah apa yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam rangka kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada persyaratan visi dan misi serta didasarkan kepada isu-isu dan analisis strategik.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dengan rincian stratejik. Atas dasar itu, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian dan kategori Perdagangan		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perindustrian	0,264	-	-	-	-	-
			Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	0,253	-	-	-	-	-
		1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	0,5	-	-	-	-	-
		1.2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	1	-	-	-	-	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Pasar	79,9	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan (Kategori Perindustrian dan Perdagangan)	-	49,00	49,05	49,10	49,15	49,20
		2.1	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		2.2	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	-	1	1	1	1	1

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Periode 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. IKU Perangkat Daerah dirumuskan sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penetapan IKU harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja Perangkat Daerah yaitu:

1. *Spesifik*

Indikator kinerja harus bersifat khusus sesuai dengan objek yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama

2. *Measurable*

Indikator kinerja yang ditetapkan harus mempunyai suatu dimensi dan tepat secara operasional

3. *Achievable*

Indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan mustahil untuk dicapai dan dalam kendali organisasi

4. *Relevant*

Indikator kinerja terkait secara logis dan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi organisasi

5. *Time Bond*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Adapun Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	1.1 Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan (Kategori Perindustrian dan Perdagangan)	%	Jumlah Persentase Kontribusi PDRB Kategori Perindustrian ditambahkan dengan Persentase Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan	$\% \text{ Kontribusi PDRB Kategori Perindustrian} + \% \text{ Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan}$	Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan
2	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	2.1 Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	%	Persentase dari selisih Nilai Produksi Sektor Unggulan Tahun (n) terhadap Nilai Produksi Sektor Unggulan Tahun (n-1) dibagi dengan Nilai Produksi Sektor Unggulan Tahun (n-1)	$\frac{\sum \text{Nilai Produksi Sektor Unggulan Th } n - \sum \text{Nilai Produksi Sektor Unggulan Th } (n-1)}{\sum \text{Nilai Produksi Sektor Unggulan Th } (n-1)} \times 100\%$	Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan
3	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	3.1 Persentase Peningkatan Omset	%	Persentase dari selisih Omset Penjualan Produk Unggulan Tahun (n) terhadap Omset Penjualan Produk Unggulan Tahun (n-1) dibagi dengan Omset Penjualan Produk Unggulan Tahun (n-1)	$\frac{\sum \text{Omset Penjualan Produk Unggulan Th } n - \sum \text{Omset Penjualan Produk Unggulan Th } (n-1)}{\sum \text{Omset Penjualan Produk Unggulan Th } (n-1)} \times 100\%$	Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022 merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan perindustrian dan perdagangan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Isi Renja adalah menjabarkan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada satu tahun ke depan. Berikut uraian tujuan dan sasaran beserta indikator selaras dengan Renja Perubahan Tahun 2022 yang dituangkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan (Kategori Perindustrian dan Perdagangan)	%	49.00	
		1.1	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	%	0,1
		1.2	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	%	1

Sumber: Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menjadi wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapaun indikator kinerja utama untuk sasaran strategis dituangkan ke dalam perjanjian kinerja kepala perangkat daerah. Adapun perjanjian kinerja oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	0,5 %
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan usaha perdagangan	1 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Pasar	80

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022

Program	Anggaran
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.964.583.767
2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 65.283.900
3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 17.971.726.783
4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 370.978.800
5. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 940.762.753
6. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 161.018.897
7. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 448.477.400
8. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 15.753.452.971

Dengan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	80 %
	Kegiatan: Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen	75 Peserta
	Sub Kegiatan: Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen	75 Peserta

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase ketercapaian retribusi pasar	100 %
	Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang direvitalisasi	33,33 %
	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat	3 Pasar
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola	6 Pasar
	Kegiatan: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase PKL yang dibina	5,8 %
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta pembinaan dan penataan PKL	85 Orang
	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah petugas pasar	143 Orang
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pangan pokok	10 %
	Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga pangan yang mengalami fluktuasi harga lebih besar 10%	20 %
	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan harga bahan pokok dan ketersediaan kebutuhan penting lainnya	264 Kali
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah bahan pokok murah yang disediakan	1.865 Paket
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan IKM yang melakukan ekspor	0,5 %
	Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang melakukan ekspor	0,4 %
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan	50 Peserta
	Sub Kegiatan: Pameran Dagang Nasional	Jumlah promosi produk unggulan skala nasional dan regional yang difasilitasi	2 Event
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase alat UTTP yang telah ditera/tera ulang	7,7 %
	Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	550 Unit
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah data potensi UTTP	1 Dokumen

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Kegiatan: Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen	40 Orang
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran	30 %
	Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah IKM yang dipromosikan	100 IKM
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah event festival kreatif	1 Event
	Sub Kegiatan: Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah event pasar murah mebel sabtu	4 Event
		Jumlah event festival senja pesisir	8 Event
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM Berkembang	5 %
	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM berkembang	30 %
	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kota Pasuruan	1 Dokumen
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	8 Kegiatan
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peserta pelatihan digitalisasi IKM	40 IKM
		Jumlah peserta pelatihan macrame	40 IKM
		Jumlah feasibility study pembentukan kawasan industri hasil tembakau	1 Dokumen
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelayanan UPTD logam yang diselenggarakan	450 Pelayanan
	Sub Kegiatan: Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah sampel garam yang diuji	300 Sampel

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022

Pada bulan Oktober tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan adanya penerapan pohon kinerja dan perjenjangan kinerja yang telah diatur di dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Penyusunan Perjenjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2022. Sehingga Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian dengan pohon kinerja dan perjenjangan kinerja. Adapun perjanjian kinerja oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	0,1 %
2	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	1 %

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022

Program	Anggaran
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9.278.235.506
2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 28.718.900
3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 22.908.713.382
4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 924.957.000
5. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 897.742.753
6. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 164.228.497
7. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 1.596.449.345
8. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 15.920.223.771

Dengan rincian perubahan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAANf	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	80 %

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kegiatan: Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen	75 Peserta
	Sub Kegiatan: Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen	75 Peserta
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase ketercapaian retribusi pasar	100 %
	Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang direvitalisasi	33,33 %
	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat	3 Pasar
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola	6 Pasar
	Kegiatan: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase PKL yang dibina	5,8 %
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peserta pembinaan dan penataan PKL	85 Orang
	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah petugas pasar	143 Orang
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pangan pokok	10 %
	Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga pangan yang mengalami fluktuasi harga lebih besar 10%	20 %
	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan harga bahan pokok dan ketersediaan kebutuhan penting lainnya	264 Kali
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah bahan pokok murah yang disediakan	1.865 Paket
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan IKM yang melakukan ekspor	5,0 %
	Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang melakukan ekspor	0,4 %
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan	50 Peserta
	Sub Kegiatan: Pameran Dagang Nasional	Jumlah promosi produk unggulan skala nasional dan regional yang difasilitasi	2 Event
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase alat UTP yang telah ditera/tera ulang	11,0 %

No.	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	550 Unit
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah data potensi UTTP	1 Dokumen
	Sub Kegiatan: Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan konsumen	40 Orang
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran	30 %
	Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah IKM yang dipromosikan	100 IKM
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah event festival kreatif	1 Event
	Sub Kegiatan: Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah event pasar murah mebel sabtu	4 Event
		Jumlah event festival senja pesisir	8 Event
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM Berkembang	5 %
	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM berkembang	30 %
	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kota Pasuruan	1 Dokumen
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	8 Kegiatan
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peserta pelatihan digitalisasi IKM	40 IKM
		Jumlah peserta pelatihan macrame	40 IKM
		Jumlah feasibility study pembentukan kawasan industri hasil tembakau	1 Dokumen
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelayanan UPTD logam yang diselenggarakan	450 Pelayanan
	Sub Kegiatan: Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah sampel garam yang diuji	300 Sampel

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja 3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai tujuan yang sudah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan dalam kurun waktu tahun anggaran tertentu. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi tentang masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berisikan uraian capaian IKU terhadap target dan realisasinya

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Pada tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan masing-masing sasaran memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu sasaran strategis pertama "Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan" dengan indikator kinerja utama "Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan" dan sasaran strategis kedua "Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan" dengan indikator kinerja utama "Persentase Peningkatan Omset". Capaian target kinerja pada tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian IKU Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	0,1 %	0,094 %	94%	Sangat Tinggi	Bidang Perindustrian
2	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	1 %	4,166 %	416,6%	Sangat Tinggi	Bidang Perdagangan

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022, IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan telah disesuaikan dengan pohon kinerja dan perjenjangan kinerja sebagaimana arahan dari MenPAN-RB, sehingga capaian kinerja IKU tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian	Persentase IKM yang terstandarisasi	14,8%					
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Nilai Volume Perdagangan	-					
		IKM Layanan Pasar	79,80					
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase Pertumbuhan IKM		16,47%	0,7%			
4	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan		25,79%	1%			
		IKM Layanan Pasar		80,20	81,5			
5	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan				0,1 %	0,094 %	94%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset				1 %	4,166 %	416,6%

Sumber: LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2019 – 2022

3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Akhir Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Tujuan: Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan (Kategori Perindustrian dan Perdagangan)	49,63%	49,20%	100,87%
2	Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	0,094%	0,1%	94,00%
3	Sasaran 2: Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	4,166%	1%	416,60%

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Periode 2021-2026

3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Standar Nasional/ Provinsi Jawa Timur	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Tujuan: Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan (Kategori Perindustrian dan Perdagangan)	49,63% - Sektor Industri: 19,93% - Sektor Perdagangan: 29,70%	Nasional: Kontribusi PDB Sektor Industri* 17,95%	- Sektor Industri: 111,03%
2	Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	0,094%	-	94,00%
3	Sasaran 2: Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	4,166%	-	416,60%

*Renstra Perubahan 2020-2024 Kementerian Perindustrian

Realisasi Indikator Tujuan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan, pada tahun 2022 sebesar 49,63%, yang terdiri atas PDRB Sektor Industri sebesar 19,93% dan Sektor Perdagangan sebesar 29,70%. Untuk indikator PDRB Sektor Industri dapat dibandingkan dengan standar nasional, yaitu Indikator Sasaran Strategis pada Kementerian Perindustrian “Kontribusi Industri Pengolahan Nonmigas pada PDB” dengan target kinerja pada tahun 2022 sebesar 17,95%. Sehingga, persentase capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan terhadap standar nasional sebesar 111,03% untuk Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian.

Untuk Indikator Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, hal ini dikarenakan Indikator Kinerja Utama pada Kementerian Perdagangan tidak memasang persentase kontribusi, melainkan persentase laju pertumbuhan PDB Sub-Sektor Perdagangan (Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2022).

Pada standar provinsi, Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yaitu (Sumber: Renstra Disperindag Prov. Jawa Timur 2019-2024):

- Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)
- Nilai PDRB Industri Pengolahan (Triliun Rupiah)
- Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)
- Nilai PDRB Perdagangan (Triliun Rupiah)

Sehingga indikator kinerja utama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tidak dapat dibandingkan dengan standar provinsi atau indikator kinerja utama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tidak memiliki keterkaitan dengan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustrian, sehingga target/capaian kinerja indikator sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional/provinsi.

3.1.6 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis

Tujuan “ Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Unggulan ”
Sasaran “ Meningkatkan Produksi Sektor Unggulan ”

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Sasaran Pertama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	0,1 %	0.094 %	94%
RATA-RATA				94%

Tabel 3.6 di atas menunjukkan indikator kinerja utama sasaran strategis pertama “Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan” yaitu Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan. Pada tahun 2022, target IKU untuk Sasaran Pertama sebesar 0,1% dan realisasi sebesar 0,094% sehingga ketercapaian target sebesar 94% atau dengan kriteria “**Sangat Tinggi**”. Pencapaian ini berdasarkan data Nilai Produksi Sektor Unggulan tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Tabel 3.7 berikut menunjukkan data Nilai Produksi Sektor Unggulan pada tahun 2021 dan 2022.

Tabel 3.7 Total Nilai Produksi Sektor Unggulan Tahun 2021 dan 2022

Klasifikasi Industri		Jumlah (Juta Rupiah)	
		2021	2022
1	Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	2.003.004	2.006.550
2	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)	1.828.426	1.828.479
Jumlah Total		3.831.430	3.835.029

Sumber: Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Tingkat keberhasilan yang telah dicapai antara lain: adanya peningkatan jumlah IKM di Kota Pasuruan. Secara umum kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian beserta program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, akan tetapi masih kurang dari target yang ingin dicapai. Persentase peningkatan produksi sektor unggulan mencapai 0,094 % kurang dari target yang ditetapkan sebesar 0,1 % karena persentase peningkatan produksi sektor unggulan ini didasarkan pada jumlah IKM yang ada di Kota Pasuruan didukung

dengan data nilai produksi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah tenaga kerja, peningkatan skill atau kemampuan SDM, peningkatan kualitas mutu produk, sertifikasi kompetensi, produktivitas dan diversifikasi produk yang dihasilkan dengan kegiatan pelatihan yang diikuti.

Untuk indikator persentase peningkatan produksi sektor unggulan tidak memiliki keterkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Sehingga target kinerja dan persentase capaian kinerja indikator pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2022, sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan ditunjukkan pada Tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Sasaran Pertama

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	Sub Kegiatan: Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini, antara lain:

- Ketidakstabilan harga bahan baku
- Lemahnya daya saing
- Keterbatasan jaringan pemasaran
- Kurangnya akses permodalan
- Kurangnya pemahaman IKM terhadap pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi produk

Dalam hal ini perlu adanya memanfaatkan tenaga ahli dan sertifikasi kompetensi dalam peningkatan kualitas SDM industri untuk pengembangan ketrampilan pelaku IKM, serta perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan standarisasi produk IKM serta diversifikasi/inovasi produk agar mempunyai daya saing di pasaran.

Tujuan “ Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Unggulan ”
Sasaran Kedua “ Meningkatkan Penjualan Produksi Sektor Unggulan ”

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Sasaran Kedua

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan Omset	1 %	4,166 %	416,6%
RATA-RATA				416,6%

Tabel 3.9 di atas menunjukkan indikator kinerja utama sasaran strategis kedua “Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan” yaitu Persentase Peningkatan Omset. Pada tahun 2022, target IKU untuk Sasaran Kedua sebesar 1% dan realisasi sebesar 4,166% sehingga ketercapaian target sebesar 416,6%. Pencapaian ini berdasarkan data Nilai Omset Produk Unggulan tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Tabel 3.10 berikut menunjukkan data Nilai Omset Produk Unggulan pada tahun 2021 dan 2022.

Tabel 3.10 Total Nilai Omset Produk Unggulan Tahun 2021 dan 2022

Klasifikasi Produk Unggulan		Jumlah (Rupiah)	
		2021	2022
1	Produk Olahan Kayu	221.875.200.000	231.120.000.000
2	Produk Logam	11.884.800.000	12.380.000.000
3	Produk Olahan Kain	35.550.841.260	37.032.126.312
Jumlah Total		269.310.841.260	280.532.126.312

Sumber: Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Tingkat keberhasilan yang telah dicapai secara umum kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan beserta program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukungnya menunjukkan hasil yang positif, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja utama yaitu pada persentase peningkatan omset yang mana antara tahun 2021 dan 2022 mencapai peningkatan sebesar 4,166%, hal tersebut dikarenakan sudah longgarnya masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kinerja pada sektor perdagangan.

Pada tahun 2022, sasaran strategis kedua didukung oleh 6 (enam) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, ditunjukkan pada Tabel 3.11 di bawah ini:

Tabel 3.11 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Sasaran Kedua

No	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	Kegiatan: Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

	Sub Kegiatan: Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Kegiatan: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota
	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
	Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan: Pameran Dagang Nasional
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
	Sub Kegiatan: Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
	Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan: Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Selain faktor pandemi, ketercapaian indikator ini juga dipengaruhi oleh kreativitas para pelaku usaha dalam memasarkan produknya sehingga pendapatan omset produk unggulan dapat meningkat dengan signifikan. Karena persentase peningkatan omset produk unggulan ini didasarkan pada jumlah IKM yang ada di Kota Pasuruan didukung dengan data pendapatan omset produk unggulan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas produk unggulan,

peningkatan skill atau kemampuan SDM dalam memasarkan produknya, dan banyaknya memanfaatkan peluang dalam proses pemasaran.

Adapun hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini, antara lain:

- Banyaknya pelaku IKM yang kurang kooperatif dalam menyampaikan omsetnya;
- Banyak pelaku usaha yang mengabaikan akan pelaporan keuangan usahanya;
- Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang digital marketing;
- Belum tersedianya sarana dan prasarana kemetrolgian berupa lahan/gedung operasional kantor yang sesuai standar kemetrolgian; dan
- Belum tersedianya unit berjalan (mobil operasional) berstandar khusus kemetrolgian yang mampu mendukung kegiatan pelayanan tera/tera ulang.

3.1.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	0,1	0,094	94	15.920.223.771	12.570.161.658	78,96	15,04%
2	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	1	4,166	416,6	26.520.809.877	17.261.835.518	65,09	351,51%

Persentase capaian sasaran Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan sebesar 94% dengan penyerapan/pencapaian anggaran untuk sebesar 78,96%. Sehingga, diperoleh persentase efisiensi sebesar 15,04%. Sedangkan, Persentase capaian sasaran Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan sebesar 416,6% dengan penyerapan/pencapaian anggaran untuk sebesar 65,09%. Sehingga, diperoleh persentase efisiensi sebesar 351,51%.

3.1.8 Analisis Keberhasilan

Tabel 3.13 Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	94	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM Berkembang	8666	Menunjang
				Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM berkembang	101	Menunjang
2	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	416,6	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	93,75	Tidak Menunjang
				Kegiatan: Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebelan Bahan Berbahaya di Tingkat di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pedagang/Produsen yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen	60,00	Tidak Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase ketercapaian retribusi pasar	93,70	Tidak Menunjang
				Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pasar yang direvitalisasi	100,00	Menunjang
				Kegiatan: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Presentase PKL yang dibina	139,66	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pangan pokok	117,40	Menunjang
				Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga Lebih Besar 10%	168,15	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan IKM yang melakukan ekspor	200,00	Menunjang
				Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang melakukan ekspor	150,00	Menunjang
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang telah ditera/tera ulang	119,73	Menunjang
				Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	308,18	Menunjang
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran	190,83	Menunjang
				Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah IKM yang dipromosikan	124,00	Menunjang

Sumber: Monev Tribulan IV Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.13, sasaran strategis yang pertama, Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan, didukung oleh 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dimana realisasi kinerja baik program maupun kegiatan telah memenuhi/melebihi target indikator atau telah persentase capaiannya $\geq 100\%$. Pada sasaran strategis kedua, Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan, didukung oleh 6 (enam) program dan 7 (tujuh) kegiatan dimana dari persentase capaian kinerja masing-masing program/kegiatan menunjukkan ada 2 (dua) program dan 1 (satu) kegiatan yang capaian kinerjanya belum mencapai 100% sehingga dikategorikan sebagai program/kegiatan yang tidak menunjang sasaran strategis.

Pelaksanaan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen terhadap Perlindungan Konsumen. Pada tahun 2022, ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 75% sehingga capaiannya sebesar 93,75%. Capaian ini berdasarkan jumlah peserta sosialisasi yang memenuhi asas perlindungan konsumen yaitu sebanyak 45 peserta dibandingkan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 60 peserta. Adapun yang menjadi penghambat pencapaian target dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada produsen dan konsumen secara intensif. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yakni Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator jumlah pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen dengan target sejumlah 60 pedagang dan terealisasi sejumlah 45 pedagang, sehingga capaiannya sebesar 75,00%. Ketidacapaian target indikator ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asas-asas perlindungan konsumen, sehingga sebagian dari undangan mengabaikan ilmu dan penjelasan yang diberikan oleh narasumber.

Upaya untuk mengatasi ketidakcapaian program dan kegiatan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan merencanakan kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen lebih intensif dan memberi penjelasan akan pentingnya asas perlindungan konsumen kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas perdagangan di Kota Pasuruan.

Kemudian, pada pelaksanaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Ketercapaian Retribusi Pasar. Pada tahun 2022, ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 93,7% sehingga capaiannya sebesar 93,70%. Capaian ini berdasarkan data target PAD Pasar pada Tahun 2022 sebesar Rp 1.584.834.492 dan terealisasi sebesar Rp 1.485.016.014. Ketidacapaian target indikator disebabkan pemulihan ekonomi pedagang pasar pasca Covid-19 sehingga menyebabkan pembayaran retribusi pelayanan pasar masih belum dapat stabil. Selain itu, adanya objek retribusi yang kosong dan mempunyai potensi dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar turut mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penerimaan retribusi pelayanan pasar.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang pasar untuk meningkatkan kesadaran akan pembayaran retribusi pelayanan pasar sehingga tidak timbul piutang.

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022 per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dapat dirinci pada Tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.14 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	28.718.900	26.327.400	92%
	Kegiatan: Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.718.900	26.327.400	92%
	Sub Kegiatan: Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	28.718.900	26.327.400	92%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	22.908.713.382	14.944.306.843	65%
	Kegiatan: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12.061.359.002	5.018.382.543	42%
	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	11.049.570.500	4.126.852.910	37%
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.011.788.502	891.529.633	88%
	Kegiatan: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	10.847.354.380	9.925.924.300	92%
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7.884.331.400	7.024.467.400	89%
	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.963.022.980	2.901.456.900	98%
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	924.957.000	768.956.605	83%
	Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	924.957.000	768.956.605	83%
	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100.437.000	67.005.405	67%

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	824.520.000	701.951.200	85%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	897.742.753	802.889.820	89%
	Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	897.742.753	802.889.820	89%
	Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	322.667.000	306.139.000	95%
	Sub Kegiatan: Pameran Dagang Nasional	575.075.753	496.750.820	86%
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	164.228.497	122.672.200	75%
	Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	164.228.497	122.672.200	75%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	147.763.997	110.374.500	75%
	Sub Kegiatan: Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	16.464.500	12.297.700	75%
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.596.449.345	596.682.650	37%
	Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.596.449.345	596.682.650	37%
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.355.747.545	369.305.900	27%
	Sub Kegiatan: Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	240.701.800	227.376.750	94%
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	15.920.223.771	12.570.161.658	79%
	Kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	15.920.223.771	12.570.161.658	79%
	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	26.712.300	3.635.000	14%
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	232.219.274	176.941.700	76%

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	209.624.500	199.054.500	95%
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	15.442.908.997	12.181.771.758	79%
	Sub Kegiatan: Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	8.758.700	8.758.700	100%

Sumber: Monev Tribulan IV Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022 tercermin melalui pencapaian sasaran strategis organisasi yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berjumlah dua indikator dengan capaian kinerja untuk indikator pertama sebesar 94% dan indikator kedua sebesar 416,6%. Berdasarkan hal tersebut bisa dikatakan segala upaya yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah **EFEKTIF** dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada aspek akuntabilitas keuangan, penyerapan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan mencapai 74,65 %. Tidak terserapnya anggaran yang sebesar 15,35 % tersebut merupakan hasil **EFISIENSI** anggaran mengingat seluruh kinerja impact dan outcome **telah tercapai** dan hampir seluruh kinerja output telah tercapai.

Dalam pencapaian target kinerja organisasi tahun 2022 muncul beberapa permasalahan / hambatan. Meskipun begitu beberapa permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif masih tetap diperlukan atas segala kemungkinan - kemungkinan masalah / hambatan yang mungkin timbul dimasa datang, sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Beberapa langkah antisipatif dan koreksi dapat ditempuh untuk akselerasi capaian kinerja organisasi dimasa datang khususnya terkait pemenuhan kebutuhan pegawai dan pelaksanaan diklat yang berkelanjutan agar bisa terus update atas regulasi terkait perencanaan dan kelitbangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 telah kami susun untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Pasuruan, 30 Januari 2023

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN**



Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 198602 1 041

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. YANUAR AFRIANSYAH,MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. SAIFULLAH YUSUF**
Jabatan : Walikota Pasuruan
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, Januari 2022

Mengetahui
Pejabat Atasan Langsung,
WALIKOTA PASURUAN

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

H. SAIFULLAH YUSUF

Drs. YANUAR AFRIANSYAH,MM

Pembina Tk. I

Nip. 19651231 198602 1 041

**PERJANJIAN KINERJA
JABATAN ESELON II**

NAMA : Drs. YANUAR AFRIANSYAH,MM
 NIP : 19651231 198602 1 041
 PANGKAT/GOL. : Pembina Tk. I
 JABATAN/ Kelas jabatan : KEPALA DINAS
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 TAHUN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah(IKM)	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	0,5%
2	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Pasar	1 % 80 Nilai
3	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	98%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9.016.697.517	APBD
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 65.283.900	APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 17.971.726.783	APBD
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 370.978.800	APBD
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 940.762.753	APBD
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 161.018.897	APBD
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 448.477.400	APBD
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 16.585.219.067	APBD
JUMLAH		Rp 45.560.165.117	APBD

Mengetahui,
 Pejabat Atasan Langsung
 WALIKOTA PASURAN

Pasuruan, Januari 2022
 KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

H. SAIFULLAH YUSUF

Drs. YANUAR AFRIANSYAH,MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19651231 198602 1 041

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. YANUAR AFRIANSYAH,MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. H. SAIFULLAH YUSUF**
Jabatan : Walikota Pasuruan
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, Oktober 2022

Pihak Kedua,
WALIKOTA PASURUAN

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan


Drs. H. SAIFULLAH YUSUF


Drs. YANUAR AFRIANSYAH,MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 198602 1 041

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
JABATAN ESELON II**

NAMA : Drs. YANUAR APRIANSYAH,MM
 NIP : 19651231 198602 1 041
 PANGKAT/GOL. : Pembina Utama Muda
 JABATAN/ Kelas jabatan : Kepala Dinas
 PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 TAHUN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
1	Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	0,5	-
2	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	%	1	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Pasar	Nilai	80	-
3	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	%	-	0,1
4	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	%	-	1

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.964.583.767	Rp 9.278.235.506	APBD
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 65.283.900	Rp 28.718.900	APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 17.971.726.783	Rp 22.908.713.382	APBD
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 370.978.800	Rp 924.957.000	APBD
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 940.762.753	Rp 897.742.753	APBD
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 161.018.897	Rp 164.228.497	APBD
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 448.477.400	Rp 1.596.449.345	APBD
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 15.753.452.971	Rp 15.920.223.771	APBD
JUMLAH		Rp 44.676.285.271	Rp 51.719.269.154	APBD

Mengetahui,
 Pejabat Atasan Langsung
 WALIKOTA PASURUAN

Pasuruan, Oktober 2022
 Kepala Dinas
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

Drs. YANUAR APRIANSYAH,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651231 198602 1 041

LAMPIRAN METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Tahun 2021 – 2026

No	SASARAN RENSTRA	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya pertumbuhan jumlah IKM	Persentase Pertumbuhan IKM	%	Peningkatan IKM dari segi kualitas produk, kemampuan dan kompetensi SDM, pemasaran, dan pengelolaan manajemen organisasi	$\frac{(\sum IKM \text{ tahun } n - \sum IKM \text{ tahun } (n-1))}{\sum IKM \text{ tahun } (n-1)} \times 100\%$	0,5	-	-	-	-	-	BPS	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	%	Persentase peningkatan jumlah jenis usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan	$\frac{\sum Usaha \text{ Perdagangan Th } N - \sum Usaha \text{ Perdagangan } N-1}{\sum Usaha \text{ Perdagangan } N-1} \times 100\%$	1	-	-	-	-	-	Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		IKM Layanan Pasar	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pasar	<i>Nilai hasil survey IKM layanan pasar</i>	79,9	-	-	-	-	-	Bidang Pengelolaan Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	%	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian kuantitas harga yang dihasilkan oleh sektor unggulan dalam kurun waktu satu tahun dikali harga per unit	$\frac{\sum Nilai \text{ Produksi Sektor Unggulan Th } n - \sum Nilai \text{ Produksi Sektor Unggulan Th } (n-1)}{\sum Nilai \text{ Produksi Sektor Unggulan Th } (n-1)} \times 100\%$	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Bidang Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	%	Jumlah pendapat yang diperoleh dari penjualan produk unggulan	$\frac{\sum Omset \text{ Penjualan Produk Unggulan Th } n - \sum Omset \text{ Penjualan Produk Unggulan Th } (n-1)}{\sum Omset \text{ Penjualan Produk Unggulan Th } (n-1)} \times 100\%$	-	1	1	1	1	1	Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KESIMPULAN EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2022

No	Nama Perangkat Daerah	Nama Program	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota (%)	Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kab/Kota	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Keterangan
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	113%	Sangat Tinggi	77%	Tinggi	1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan konsumen sehingga kurang antusias. 2. Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha akan pengembangan produk. 3. Dalam proses monitoring tidak jarang ada pedagang yang kurang kooperatif terkait pemberian informasi harga bahan pokok. 4. Kurangnya pengetahuan para pemilik alat UTTP untuk kewajiban melaksanakan tera dan tera ulang. 5. Kurangnya sarana dan prasarana, misal alat standar dan kendaraan operasional. 6. Antusias masyarakat yang kurang baik akan produk dalam negeri.	1. Pentingnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan konsumen. 2. Potensi produk unggulan kota pasuruan yang sangat bagus dan sayang jika tidak diperkenalkan. 3. SDM kemetrotlogian sudah terpenuhi dan standar kemetrotlogian setidaknya cukup bisa melayani pelayanan tera dan tera ulang. 4. Banyaknya pelaku usaha yang akan difasilitasi.	
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan							
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan									
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting									
Program Pengembangan Ekspor									
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen									
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri							
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	8666%	Sangat Tinggi	79%	Tinggi	1. Minimnya pemahaman pelaku IKM tentang pentingnya memiliki legalitas usaha, NIB (Nomor Induk Berusaha), Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). 2. Jenis produk IKM yang tidak inovatif sehingga tidak mampu memenuhi keinginan konsumen serta permintaan pasar. 3. Terbatasnya informasi IKM terhadap peluang pasar.	1. Kemudahan pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dapat dilakukan secara online. 2. Kemajuan teknologi memudahkan pelaku usaha untuk menganalisa trend yang diminati konsumen. 3. Banyaknya platform market place dan media sosial tidak berbayar yang dapat digunakan untuk memperluas pemasaran.	

Pasuruan, 18 Januari 2023

Mengetahui,

KEPALA DINAS

**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PASURUAN**



Drs. YANUAR AFRIANSYAH, M.M

NIP. 19651231 198602 1 041

**KERTAS KERJA PERHITUNGAN CAPAIAN OUTCOME
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN**

No.	Nama Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Formula Perhitungan	Data Masukan		Hasil Perhitungan	Keterangan
				Variabel	Nilai		
1	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN					
	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan (Kategori Perindustrian dan Perdagangan)					Tujuan
2	SASARAN	INDIKATOR SASARAN					
	Meningkatnya Produksi Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Unggulan	$\frac{\sum \text{Nilai Produksi Sektor Unggulan Th } n - \sum \text{Nilai Produksi Sektor Unggulan Th } (n-1)}{\sum \text{Nilai Produksi Sektor Unggulan Th } (n-1)} \times 100\%$	Nilai Produksi Sektor Unggulan Tahun 2022 = 3.835.029 Juta Rupiah Nilai Produksi Sektor Unggulan Tahun 2021 = 3.831.430 Juta Rupiah	$\frac{3.835.029 - 3.831.430}{3.831.430} \times 100$	94	Sasaran
	Meningkatnya Penjualan Produk Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Omset	$\frac{\sum \text{Omset Penjualan Produk Unggulan Th } n - \sum \text{Omset Penjualan Produk Unggulan Th } (n-1)}{\sum \text{Omset Penjualan Produk Unggulan Th } (n-1)} \times 100\%$	Omset Penjualan Produk Unggulan Tahun 2022 = 280.532.126.312 Omset Penjualan Produk Unggulan Tahun 2021 = 269.310.841.260	$\frac{280.532.126.312 - 269.310.841.260}{269.310.841.260} \times 100$	416,6	Sasaran
3	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	$\frac{\text{Indikator Sub Kegiatan yang Terpenuhi}}{\text{Total Indikator Sub Kegiatan}} \times 100\%$	Indikator Sub Kegiatan yang Terpenuhi = 30 Total Indikator Sub Kegiatan = 33	$\frac{30}{33} \times 100$	91	Program
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{Dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu}}{\sum \text{Dokumen perencanaan}} \times 100\%$	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu = 10 Jumlah dokumen perencanaan = 10	$\frac{10}{10} \times 100$	100	Kegiatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{Laporan keuangan yang tersusun tepat waktu}}{\sum \text{Laporan keuangan}} \times 100\%$	Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu = 4 Jumlah laporan keuangan = 4	$\frac{4}{4} \times 100$	100	Kegiatan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{Laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu}}{\sum \text{Laporan barang milik daerah}} \times 100\%$	Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun tepat waktu = 4 Jumlah laporan barang milik daerah = 4	$\frac{4}{4} \times 100$	100	Kegiatan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	$\frac{\sum \text{Peserta yang hadir sosialisasi perundang-undangan}}{\sum \text{Peserta sosialisasi perundang-undangan}} \times 100\%$	Jumlah peserta yang hadir sosialisasi peraturan perundang undangan = 100 Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan = 100	$\frac{100}{100} \times 100$	100	Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{Layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi}}{\sum \text{Layanan administrasi perkantoran}} \times 100\%$	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi = 4 Jumlah layanan administrasi perkantoran = 4	$\frac{4}{4} \times 100$	100	Kegiatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	$\frac{\sum \text{Pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi}}{\sum \text{Pengadaan barang milik daerah}} \times 100\%$	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi = 2 Jumlah pengadaan barang milik daerah = 2	$\frac{2}{2} \times 100$	100	Kegiatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	$\frac{\sum \text{Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi}}{\sum \text{Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah}} \times 100\%$	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi = 3 Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah = 3	$\frac{3}{3} \times 100$	100	Kegiatan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	$\frac{\sum \text{Pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi}}{\sum \text{Pemeliharaan barang milik daerah}} \times 100\%$	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi = 4 Jumlah pemeliharaan barang milik daerah = 4	$\frac{4}{4} \times 100$	100	Kegiatan

No.	Nama Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Formula Perhitungan	Data Masukan		Hasil Perhitungan	Keterangan
				Variabel	Nilai		
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	$\frac{\sum \text{IKM yang Memenuhi Asas Perlindungan Konsumen}}{\sum \text{IKM yang Mengikuti Kegiatan Sos PK}} \times 100\%$	Pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen = 45 Jumlah peserta sosialisasi PK = 60	45/60*100%	75	Program
	<i>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen</i>	$\sum \text{pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen}$	Pedagang/produsen yang memenuhi asas perlindungan konsumen = 45	45	45	Kegiatan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase ketercapaian retribusi pasar	$\frac{\text{Realisasi PAD pada Tahun N}}{\text{Target PAD pada tahun N}} \times 100\%$	Realisasi PAD pada tahun 2022 = Rp. 1.485.016.014 Target PAD pada tahun 2022 = Rp. 1.584.834.492	1.485.016.014/1.584.834.492*100%	93.7	Program
	<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Persentase pasar yang direvitalisasi</i>	$\frac{\sum \text{Pasar yang Direvitalisasi}}{\sum \text{Pasar yang Dikelola}} \times 100\%$	Jumlah pasar yang direvitalisasi = 2 Jumlah Pasar yang dikelola = 6	2/6*100%	33.33	Kegiatan
	<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>	<i>Persentase PKL yang dibina</i>	$\frac{\sum \text{PKL yang sudah Dibina sampai dengan Tahun N}}{\sum \text{PKL Kota Pasuruan}} \times 100\%$	Jumlah PKL yang dibina sampai dengan tahun 2022 = 120 orang Jumlah PKL Kota Pasuruan = 1.469 orang	120/1469*100%	8.1	Kegiatan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pangan pokok	Rata-rata Fluktuasi Harga Pangan	Rata-rata Persentase Perubahan harga = 8,26	8,26	8,26	Program
	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase harga pangan yang mengalami fluktuasi harga lebih besar 10%</i>	$\frac{\sum \text{Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi Harga } > 10\%}{\sum \text{Jenis Bahan Pokok}} \times 100\%$	Jumlah Harga Pangan yang Mengalami Fluktuasi harga lebih besar 10% = 4,33 Jenis bahan pokok yang dipantau = 68	4,33/68*100%	6,37	Kegiatan
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan IKM yang melakukan ekspor	$\frac{\sum \text{IKM Ekspor Th N} - \sum \text{IKM Ekspor Th N - 1}}{\text{IKM Ekspor Th N - 1}} \times 100\%$	IKM Ekspor tahun 2022 = 22 IKM Ekspor tahun 2021 = 20	(22-20)/20*100%	10	Program
	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase IKM yang melakukan ekspor</i>	$\frac{\sum \text{IKM Ekspor}}{\sum \text{IKM}} \times 100\%$	IKM Ekspor tahun 2022 = 22 Jumlah IKM = 3416	22/3416*100%	0,6	Kegiatan
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Prosentase alat UTTP yang telah ditera/tera ulang	$\frac{\sum \text{Alat UTTP yang telah di TTU}}{\sum \text{Potensi alat UTTP di Kota Pasuruan}} \times 100\%$	Jumlah alat UTTP yang telah ditera/tera ulang = 1695 Jumlah potensi alat UTTP keseluruhan = 12870	1695/12870*100%	13,17	Program
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	<i>Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang</i>	$a = \sum_{k=1}^{n+1} (\text{alat UTTP yang telah di TTU bulan ke}),$	Jumlah alat UTTP yang telah ditera/tera ulang tahun 2022 = 1695	1695	1695	Kegiatan
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran	$\frac{\sum \text{IKM yang Mengalami Peningkatan}}{\sum \text{IKM yang Dipromosikan}} \times 100\%$	IKM yang mengalami peningkatan pemasaran =71	71/124*100%	57,25	Program
	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>Jumlah IKM yang dipromosikan</i>	$\sum \text{IKM yang dipromosikan}$	Jumlah IKM yang dipromosikan = 124	124	124	Kegiatan
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan IKM Berkembang Industri	$\frac{\sum \text{IKM Berkembang Th N} - (\sum \text{IKM Th (n - 1)})}{\sum \text{IKM Berkembang Th (n - 1)}} \times 100\%$	Jumlah IKM Berkembang Tahun 2021 Jumlah IKM Berkembang Tahun 2022	15 80	433.33	Program

No.	Nama Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Formula Perhitungan	Data Masukan		Hasil Perhitungan	Keterangan
				Variabel	Nilai		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM berkembang	$\frac{\sum \text{IKM Berkembang}}{\sum \text{IKM yang Dilatih}} \times 100\%$	Jumlah IKM Berkembang	80	30.3	Kegiatan
				Definisi IKM Berkembang: Perkembangan IKM ini dilihat dari peningkatan skill atau kemampuan SDM pengrajin, peningkatan kualitas mutu produk, sertifikasi kompetensi, produktivitas dan diversifikasi produk yang dihasilkan.	Jumlah IKM yang Dilatih		

Pasuruan, 18 Januari 2023

Mengetahui,

KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KOTA PASURUAN



Drs. YANUAR AFRIANSYAH, M.M

NIP. 19651231 198602 1 041